

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku

- Anwar, Chairul. 1997. *Hukum Adat Indonesia Meninjau Adat Minangkabau*. Jakarta : PT. Rhineka Cipta.
- Huda, Ni'matul. 2015. *Hukum Pemerintahan Desa (Dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi)*. Malang : Setara Press.
- Mashab, Mashuri. 1992. *Pemerintahan Desa di Indonesia*. Yogyakarta : Pusat Studi Sosial Universitas Gajah Mada.
- Mulyono, Sutrisno Purwohadi. 2014. *Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Semarang : Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
- Pujirahayu, Esmi Warassih. 2008. *Otonomi Desa Berbasis Modal Sosial Dalam Perspektif Socio-Legal*. Semarang : Jurusan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Diponegoro.
- Setiady. 2013. *Kunci Desa*. Malang : Pustaka Ilmu Wonosari.
- Soekanto, Soerjono. 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soekanto, Soerjono, Sri Mamuji. 2004. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Soemitro, Roni Hanitijo. 1982. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sunarno, Siswanto. 2006. *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Widjaja. 2012. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang asli Bulat dan Utuh*. Depok : Rajagrafindo Persada.
- Wijaya. 2008. *Desa Merupakan Suatu Kesatuan Hukum*. Jakarta : PT.Rhineka Cipta.

b. Undang-Undang

Undang-Undang Dasar 1945;

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana
Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang
Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari;

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang
Nagari;

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2008 tentang
Nagari.

c. Jurnal

Amalia Diamantina, *“UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa Sebagai
Manifestasi Penegakan Pasal 18 B Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945”*,
Jurnal Masalah -Masalah Hukum, Jilid 45 No. 1, 2016.

Karjuni Dt. Maani , *“Pemberdayaan Lembaga Pemerintahan Nagari
Melalui Pendekatan Balanced Scorecard”*, Jurnal Demokrasi Vol. VII
No.1, 2008.

Lastuti Abubakar, *“Revitalisasi Hukum Adat Sebagai Sumber Hukum
Dalam Membangun Sistem Hukum Indonesia”*, Jurnal Dinamika Hukum,
Vol. 11, No. 2, 2013.

Nur'aini Muslim dan Irwan Nasution, *“Kinerja Aparat Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa”*, Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik 2 (2) 2014.

Yasril Yunus, *“Model Pemerintahan Nagari Yang Partisipatif dalam Masyarakat Minangkabau”*, Jurnal Demokrasi Vol. VI No. 2, 2007.

d. Internet

Website Kabupaten Tanah Datar, diakses dari <https://tanahdatar.go.id/profil.html>, pada tanggal 7 Februari 2019 pukul 12.45.

e. Laporan

Laporan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Saruaso Kabupaten Tanah Datar Tahun 2018-2023.